

PERKEMBANGAN SEKOLAH GURU B (SGB) I DI PURWOREJO TAHUN 1950-1961

Fitri Cahyani, Dinar Widiyanta, Ririn Darini

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
fitricahyani.2017@student.uny.ac.id, danarwidiyanta@uny.ac.id,
ririndarini@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui didirikannya SGB di Purworejo, penyelenggaraan SGB di Purworejo, dan dampak didirikannya SGB di Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri empat langkah yaitu heuristik, kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini yaitu Daftar Buku Induk SGB dan Surat Keputusan Penghapusan SGB. Kritik atau verifikasi, merupakan kegiatan penentu keautentikan dan kredibilitas sumber-sumber yang telah terkumpulkan. *Aufassung* atau interpretasi, kegiatan menafsirkan sumber yang sudah valid kebenarannya untuk memperoleh suatu peristiwa sejarah. *Darstellung* atau historiografi, kegiatan menyatukan seluruh hasil penelitiannya dalam suatu penulisan yang utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kewajiban Belajar mengalami kesulitan biaya, gedung dan tenaga pengajar. Purworejo didirikan SGB untuk mengatasi kurangnya guru untuk Sekolah Rakyat. Tahun 1950-1961 di Purworejo terdapat tiga SGB yaitu SGB I Purworejo SGB II Purworejo dan SGB Kutoarjo. SGB di Purworejo juga memberikan dampak lahirnya golongan priyayi dan lulusan SGB mampu untuk mensejahterakan kehidupannya. Adanya SGB memunculkan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Kemudian SGB telah memenuhi kebutuhan guru untuk SR sehingga terjadi kelebihan jumlah guru.

Kata Kunci: SGB, Purworejo, Kewajiban Belajar, Kesejahteraan hidup.

Abstrak

This study aims to determine the establishment of the SGB in Purworejo, the implementation of the SGB in Purworejo, and the impact of the establishment of the SGB in Purworejo. This study uses a critical historical method which consists of four steps, namely heuristics, activities of searching and gathering sources related to the topic in this study, namely the SGB Main Book List and the SGB Elimination Decree. Criticism or verification is an activity to determine the authenticity and credibility of the collected sources. Aufassung or interpretation, the activity of interpreting a source that has valid truth to obtain a historical event. Darstellung or historiography, the activity of uniting all the results of his research in a complete writing. The results of this study indicate that implementing the Learning Obligation has difficulty in costs, buildings and teaching staff. Purworejo was founded by SGB to address the lack of teachers for the People's School. In 1950-1961 there were three SGBs in Purworejo, namely SGB I Purworejo, SGB II Purworejo and SGB Kutoarjo. SGB in Purworejo also had an impact on the birth of the priyayi group and SGB graduates were able to prosper their lives. The

existence of SGB creates new economic opportunities for the local community. Then SGB has met the needs of teachers for SR so that there is an excess of teachers.

Keywords: *SGB, Purworejo, Obligation to Study, Welfare.*

PENDAHULUAN

Pada zaman Hindia-Belanda rakyat sangat sedikit yang mendapatkan pendidikan. Sebagian besar rakyat Indonesia masih dalam kondisi buta huruf. Kondisi tersebut jelas membebani pemerintah yang masih baru untuk mengatasi persoalan pendidikan tersebut (Fadli dan Kumalasari, 2019: 131). Usaha pemerintah untuk menanggulangi permasalahan dalam bidang pendidikan yaitu melalui Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) yaitu Suwandi. Pada tanggal 1 Maret 1946 telah membentuk (Sjamsuddin dkk, 1993: 12) suatu Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara mengadakan Kongres Pendidikan Indonesia (Lapian dkk, 1996: 262). Kongres Pendidikan pada tahun 1948 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) yaitu Mr. Ali Sastroamidjojo membentuk panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara (Ahmadi 1987: 75).

Pada tahun 1949 Ki Sarmidi Mangunsarkoso dalam Kongres Pendidikan di Yogyakarta berhasil menyusun Undang-Undang Pokok Pendidikan. Berdasarkan persetujuan BPKNIP dan Presiden RI Mr. Assaat dan Menteri PP dan K menghasilkan UU No. 4 tahun 1950 (Lapian dkk, 1996: 263). UU No.4 tahun 1950 Bab VII Pasal 10 tentang Kewajiban Belajar menegaskan semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya (Ahmadi, 1987: 79-80). Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI, Pasal 17 menegaskan bahwa: “Tiap-tiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah”. Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak, baik untuk pendidikan rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi.

Keinginan belajar yang meningkat dari rakyat memaksa pemerintah melakukan usaha-usaha untuk dapat menampung hasrat dan keinginan belajar (Djojonegoro, 1996: 80-81). Usaha nyata yang dilakukan pemerintah dalam periode 1945-1950 ditunjukkan pada kebutuhan utama yang berkenaan dengan bangunan sekolah, tenaga pengajar dan kurikulum. Revolusi kemerdekaan ini mengakibatkan pendidikan mengalami keadaan yang parah karena sarana prasarana dan tenaga pengajar dalam keadaan yang sangat menyedihkan (Arta, 2015:115).

Faktor penyebab kurangnya tenaga guru di tingkat pendidikan rendah banyak yang bergabung dengan laskar-laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Tuntutan rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang dikuatkan dengan UU No. 4 tahun 1950, Pasal 10 dan UUD 1945 Pasal 17, maka pemerintah harus membuka banyak sekolah rakyat serta meningkatkan lama pendidikan dari 3 tahun menjadi 6 tahun (Astutik dkk, 1997: 66). Pada tahun 1950 Indonesia membutuhkan tenaga pengajar sebanyak 19.816. Selain itu 50.200 tenaga pengajar yang harus ditingkatkan pendidikannya (Badinah, 2017: 4). Pemerintah berupaya untuk mengatasi kekurangan guru melalui Menteri P.P. dan K dengan menyelenggarakan pendidikan guru yaitu Sekolah Guru C, Sekolah Guru B, Sekolah Guru A. Masing-Masing lama pendidikan guru lamanya dua, empat, dan enam tahun. Pemerintah kemudian menghapus Sekolah Guru C dua tahun atas saran dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Adanya pertimbangan bahwa Sekolah Guru 2 tahun belum cukup untuk pengajaran dan belum memenuhi syarat sebagai guru (Astutik dkk, 1997: 66-67). Kementerian PP dan K mengadakan pendidikan calon guru yang banyak dalam jangka waktu 10 tahun. Maka diadakannya Kursus Pengajar untuk Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB), tetapi karena tidak adanya dukungan dari masyarakat maka pada tahun 1953 KPKPKB ini di ubah menjadi SGB (Badinah, 2017: 4-5).

Penulis tertarik untuk meneliti Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) I di Purworejo pertama, karena merupakan sekolah guru yang memiliki usia paling lama serta berperan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pasca kemerdekaan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat menjalankan program Kewajiban Belajar. Kedua, sebagai kota pensiunan Purworejo lebih

dulu dikenal sebagai daerah penghasil tenaga pengajar dalam bidang pendidikan, hal ini terlihat dari sekolah guru yang pernah berdiri di Purworejo sehingga disebut sebagai penghasil tenaga pengajar. Ketiga, Sekolah Guru B (SGB) merupakan salah satu dari sekolah guru yang didirikan di Purworejo yang menghasilkan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat (SR). SR sendiri sangat membutuhkan tenaga pengajar, karena banyaknya anak-anak yang memasuki SR akibat dari adanya program Kewajiban Belajar di Purworejo. SGB di Purworejo ini telah memenuhi kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat pada tahun 1950-1961, sehingga keberadaan SGB tersebut mampu menjawab akan hausnya pendidikan dan memberikan dukungan terhadap seluruh anak-anak di Purworejo untuk memasuki bangku sekolah. Penulis memilih batasan dalam rentan waktu tahun 1950-1961 karena pada tahun 1950 SGB di Purworejo untuk yang pertama sehingga sebagai pertanda dimulainya penyelenggaraan SGB dan pada tahun 1961 jumlah kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat (SR) sudah dapat tercukupi, kemudian sesuai dengan adanya keputusan pemerintah untuk melaksanakan penghapusan dan pengalihan fungsi SGB maka SGB di Purworejo ikut melaksanakan penghapusan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui didirikannya Sekolah Guru B di Purworejo, penyelenggaraan Sekolah Guru B di Purworejo dan dampak didirikannya Sekolah Guru B di Purworejo.

METODE

Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya. Metode Sejarah yang digunakan sebagai berikut: (Abdurrahman, 1999:44) *pertama* heuristik merupakan kegiatan penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan (Sulasman, 2014: 93). Sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah yaitu Sumber Primer berupa arsip, catatan penjelasan, risalah sidang, daftar hadir peserta (sebuah rapat), surat keputusan, dan sebagainya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Arsip SMA Negeri 7 Purworejo berisi Daftar Induk Sekolah Guru Negeri A/B, 1950-1961.

Arsip SMP Negeri VI Yogyakarta berisi Surat Keputusan Menteri PP dan K tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 No. 69691/S. Tentang melaksanakan penghapusan SGB diseluruh Indonesia secara berangsur-angsur terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960.

Sumber sekunder berupa laporan hasil penelitiannya, karya ilmiah, biografi, dan sebagainya (Hamid dan Madjid, 2018: 44-45). *Kedua* kritik atau verifikasi yaitu penentu keotentikan (keaslian sumber) biasa disebut dengan kritik eksternal dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) biasa dikenal dengan kritik internal sumber sejarah (Hamid dan Madjid, 2019, 47-48). *Ketiga Aufassung* atau interpretasi yaitu dua metode analisis dan sintesis. Interpretasi digunakan dengan membandingkan data untuk menyikap alasan terjadinya suatu peristiwa sejarah pada masa lampau (Sulasman, 2014: 139). *Keempat Darstellung* atau historiografi yaitu suatu kegiatan memasuki tahap menulis dengan mengerahkan seluruh daya pikirannya. Menggunakan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis (Syamsuddin, 2012: 121).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Didirikannya Sekolah Guru B di Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah yang berupaya mempersiapkan agar bisa melaksanakan program Kewajiban Belajar (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020). Pelaksanaan program Kewajiban Belajar mengalami hambatan yaitu kurangnya gedung sekolah, kurangnya guru serta alat-alat pelajaran dan perlengkapan (Poerbakwatja, 1970: 183). Upaya menjalankan program pemerintah ini maka Kabupaten Purworejo didirikan sekolah guru yaitu yang bernama Sekolah Guru B (SGB) bertujuan untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020). Didirikan SGB I Purworejo tahun 1950

merupakan akibat dari program Kewajiban Belajar, sehingga terjadi kekurangan jumlah guru. Peminat sekolah SGB semakin tinggi maka KPKPKB Purworejo diubah menjadi SGB II, dan KPKPKB Kemiri diubah menjadi SGB Kutoarjo (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari 2020).

Purworejo memiliki tiga SGB hal ini sangat mendukung pelaksanaan Kewajiban Belajar. Banyaknya lulusan SR yang memasuki SGB juga karena faktor adanya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah yaitu Ikatan Dinas (ID). SR yang tergolong lulusan terbaik akan memilih SGB sebelum sekolah-sekolah lanjutan lainnya seperti SMP, SMEP, ST dan lain sebagainya. Dalam hal ini SGB memperoleh calon SGB yang terbaik. Setelah memasuki SGB akan dihadapkan dengan suasana keguruan, seperti asrama, penampilan guru, dan sebagainya (Surya, 2004: 83).

B. Penyelegaraan Sekolah Guru B di Purworejo

1. Pelaksanaan SGB Purworejo

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk memasuki bangku sekolah, menerangkan bahwa telah terbuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengenyam pendidikan terutama kelas menengah ke bawah. Dukungan dari pemerintah berupa Ikatan Dinas (ID) yang diberikan setiap bulannya kepada murid SGB (Badinah, 2017:54). Persyaratan berlaku untuk para calon murid SGB yaitu mempunyai cacat rohani dan jasmani tidak diperkenankan mengikuti ujian masuk sekolah guru, kemudian calon murid saat mendaftarkan diri sebagai murid harus menyerahkan satu keterangan dari tabib yang menyatakan berbadan sehat (*Majalah Pewarta P.P.K*, April 1952), memiliki ijazah SR serta mengikuti seleksi atau ujian masuk (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari 2020). Ujian seleksi masuk SGB meliputi; nilai ujian masuk, ujian bahasa Indonesia, berhitung dan pengetahuan umum (*Arsip SMA Negeri 7 Purworejo*, 1950-1961).

Murid selain dari SR juga dapat masuk SGB, seperti KPKPKB dimana mereka yang masih duduk di bangku KPKPKB beralih ke SGB (Supijah,

wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri, Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020). Murid SGB yang berasal dari lulusan Sekolah Rakyat (SR) nantinya akan memasuki kelas A, B, serta C, kemudian dari Kursus Pengajar untuk Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) masuk kelas D dan E (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). Lulusan SMP juga bisa masuk ke SGB yaitu hanya kelas IV disebut dengan SGB istimewa. SGB istimewa ini hanya diadakan pada tahun pelajaran 1951/1952.

Tabel 1. Murid SGB I Purworejo Tahun 1950-1961

| Tahun | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Jumlah |
|-----------|---------|----------|-----------|----------|--------|
| 1950/1951 | 78 | 72 | 75 | 54. | 279 |
| 1951/1952 | 125 | 119 | 110 | 88 | 442 |
| 1952/1953 | 104 | 88 | 87 | 92 | 371 |
| 1953/1954 | 198 | 193 | 184 | 178 | 753 |
| 1954/1955 | 72 | 71 | 66 | 61 | 270 |
| 1955/1956 | 71 | 65 | 58 | 46 | 240 |
| 1956/1957 | 109 | 96 | 88 | 65 | 358 |
| 1957/1958 | 83 | 80 | 67 | 43 | 273 |
| 1958/1959 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 1959/1960 | - | - | - | 3 | 3 |
| 1960/1961 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Jumlah | 846 | 790 | 740 | 638 | 3.014 |

Sumber: *Arsip SMA Negeri 7 Purworejo berisi Daftar Induk Sekolah Guru Negeri A/B, 1950-1961.*

Murid SGB dari tahun 1950 sampai 1961 mengalami pasang surut tetapi penerimaan murid paling banyak di tahun 1953 dan tahun 1959 sangat sedikit. Jumlah murid SGB tidak utuh sampai kelas IV tetapi mengalami pengurangan dan penambahan dengan masuknya murid pindahan dari SGB lain (*Arsip SMA Negeri 7 Purworejo, 1950-1961*). SGB Purworejo tidak hanya menerima murid dari wilayah Purworejo, tetapi juga luar Purworejo seperti wilayah Kebumen, Wates, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap, dan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti daerah Wadas Kulon Progo (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020). Selain murid di SGB juga

terdapat tenaga pengajar atau guru yang merupakan orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.

Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (Hamzah, 2014: 15). Tenaga pengajar SGB Purworejo tidak hanya berasal dari daerah Purworejo, tetapi juga daerah luar Purworejo, seperti; Kebumen, Surakarta, Banjar, Semarang dan Yogyakarta (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). Tenaga pengajar merupakan lulusan dari SGA serta BI (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari 2020). Tenaga pengajar di SGB ini permata pelajaran sehingga satu pelajaran akan diampu oleh satu orang guru. Dalam sekolah SGB juga terdapat satu orang kepala yang disebut dengan Direktur. Direktur ini memiliki wewenang untuk mengamati, mengawasi, serta mengkoordinasi para guru (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020).

Tabel 2. Tenaga Pengajar di SGB Purworejo Tahun 1950-1961

| SGB I | SGB II | SGB Kutoarjo |
|--------------|---------------|---------------------|
| Suwaji | - | R. Mardikun |
| Mumpuni | - | R. Suteng Sulasmono |
| Dirjo | - | Hadi Subroto |
| - | - | Suryono |
| - | - | Sugito |
| - | - | Amini |
| - | - | Pujiati |
| - | - | Widati |
| - | - | Warsono |
| - | - | Murtinah |
| - | - | Muhadi |
| - | - | Muslikah |

Sumber: Wawancara SGB I: Slamet Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020. Wawancara SGB Kutoarjo: Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo,

28 Februari 2020. Seno, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 7 Maret 2020. Kusnantoro, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 15 Juni 2020. Tumijo, wawancara di Desa Ngampel, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020. Supijah, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri, Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020.

Berdasarkan tabel di atas seluruh tenaga pengajar SGB Purworejo jumlahnya banyak. Tetapi SGB I Purworejo tidak diketahui secara pasti hanya 3 guru yang diketahui. SGB II Purworejo tidak diketahui jumlah tenaga pengajarnya kemudian SGB Kutoarjo ± 12 guru. Pelaksanaannya SGB masih kekurangan gedung yaitu pada asramanya. Murid SGB memanfaatkan rumah-rumah penduduk digunakan sebagai asrama (*Majalah Pusara*, September 1953). Gedung yang digunakan oleh SGB Purworejo merupakan bangunan masa kolonial. Awalnya gedung tersebut didirikan untuk sekolah HKS, ELS, dan MULO, kemudian pada masa kemerdekaan digunakan untuk sekolah SGB. Gedung sekolah HKS beralih fungsi menjadi SGB I, kemudian gedung ELS menjadi SGB II, dan gedung MULO menjadi SGB Kutoarjo (Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Informasi Kabupaten Purworejo: tidak diterbitkan). Bangunan SGB terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang direktur, perpustakaan, ruang peralatan yang berisi penyimpanan peralatan olahraga, dan asrama. Ruang kelas SGB Purworejo terdiri dari kelas A, B, C, D, dan E. Asrama SGB I terletak di sebelah utara dan selatan SGB, serta terdapat satu ruang untuk tenaga pengajar yang tinggal di asrama (Slamet Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). SGB II dan SGB Kutoarjo menggunakan rumah-rumah penduduk di sekitar sekolah sebagai asrama (Supijah, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri, Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020). Asrama-asrama tersebut ditempati para murid kelas I-IV, tetapi untuk murid yang tidak naik kelas, misalnya kelas I tidak naik ke kelas II maka murid tersebut dikeluarkan dari asrama. Selain itu murid-murid tersebut harus melaju atau menyewa tempat tinggal sendiri yaitu berupa kos atau mondok (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020).

Besarnya pemungutan uang sekolah di SGB tersebut berdasarkan

penghasilan dari orang tua wali murid masing-masing (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari 2020) Murid yang mendapatkan tunjangan Ikatan Dinas tidak dipungut biaya sekolah dalam bentuk apapun, baik uang peralatan maupun uang sekolah. Ikatan Dinas yang diperoleh setiap murid SGB yaitu sebesar 144,00 (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). Uang tersebut diberikan kepada murid-murid SGB khusus tahun 1950-1951 sebesar 75,00 Tetapi untuk seterusnya uang yang diterima murid SGB berikatan dinas sejumlah 85,00. (*Arsip SMA Negeri 7 Purworejo, 1950-1961*). Pemberian Ikatan Dinas dihentikan, jika pelajar tidak naik kelas atau tidak lulus ujian karena kurang rajin belajar atau hal lain yang disebabkan kesalahan sendiri.

Berdasarkan hal ini maka yang bersangkutan harus mengembalikan Ikatan Dinas. Tetapi murid tersebut diizinkan melanjutkan sekolah sebagai murid yang membiayai sendiri, apabila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan sekolah (*Majalah Pewartu P.P.K, November 1952*). Kurikulum yang digunakan SGB merupakan kurikulum SMP ditambah mata pelajaran kependidikan (Astuti, 2016: 61). Lama pendidikan di SGB adalah empat tahun meliputi: kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga mempunyai bobot yang setara dengan SMP dan satu tahun di kelas empat merupakan pelajaran kependidikan (Surya, 2004: 82).

Pelaksanaan praktik mengajar kelas empat untuk SGB I Purworejo bagi murid yang sudah naik ke kelas empat dan memasuki catur wulan ke-2 akan ditempatkan untuk latihan mengajar di SR latihan (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). Praktik mengajar di SGB Kutoarjo yaitu murid-murid SR latihan diantar ke SGB, dilaksanakan setiap hari sabtu (Tumijo, wawancara di Desa Ngampel Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020). Pelaksanaan ujian Penghabisan hanya sampai pada tahun 1958, yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian I untuk kelas 3 (tiga) SGB dan bagian II bagi kelas 4 (empat) (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 291). Tahun 1959 kelas 3 (tiga) SGB tidak lagi diberikan ujian, mereka hanya diberi ujian sekolah yang bercorak seperti ulangan umum untuk kenaikan kelas. Hasil dari ujian sekolah tersebut diikutkan kelak dalam penentuan lulus tidaknya dalam ujian

penghabisannya (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 291).

Tabel 3. Jumlah Lulusan SGB Purworejo Tahun 1951-1961

| Tahun | Lulus Ujian Kelas III | Lulus Ujian Kelas IV | Jumlah |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1951 | 2 | 1 | 3 |
| 1952 | - | 22 | 22 |
| 1953 | 8 | 42 | 50 |
| 1954 | 2 | 36 | 38 |
| 1955 | 9 | 96 | 105 |
| 1956 | 4 | 89 | 93 |
| 1957 | 1 | 154 | 155 |
| 1958 | 6 | 69 | 75 |
| 1959 | 6 | 36 | 42 |
| 1960 | 22 | 36 | 58 |
| 1961 | - | 66 | 66 |
| Jumlah | 60 | 647 | 707 |

Sumber : *Arsip SMA Negeri 7 Purworejo berisi Daftar Induk Sekolah Guru Negeri A/B, 1950-1961.*

Lulusan SGB lebih banyak berasal dari ujian di kelas IV. Lulusan dari ujian kelas III kemudian memasuki Sekolah Guru A (SGA) di luar daerah, dengan persetujuan wali murid yang bersangkutan (*Arsip SMA Negeri 7 Purworejo, 1950-1961*). Bagi yang tidak lulus dalam ujian kelulusan SGB di kelas IV setelah dua kali mengikuti ujian maka dapat mengikuti ujian persamaan SGB. Penempatan lulusan SGB di seluruh SR Purworejo kemudian ke seluruh daerah Jawa Tengah seperti daerah Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Pekalongan, Semarang dan Kebumen (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020).

2. Berakhirnya SGB Purworejo

Perubahan SGB menjadi SGA, berdasarkan pernyataan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yaitu kualitas guru untuk Sekolah Rakyat (SR) harus dilakukan peningkatan dari SGB ke SGA (Badinah, 2017: 89-90). Guru yang mengalami kelebihan pada suatu daerah akan ditempatkan ke daerah lain yang masih kurang tenaga pengajar (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 51). Kepada daerah swatantra tingkat I (Provinsi) diserahkan biaya untuk

penyelenggaraan pendidikan dipikul oleh provinsi dengan dibantu oleh Pemerintah Pusat. Praktek ini menimbulkan kendala, gaji yang tidak menarik juga prosedur pemberhentian dan pengangkatan yang panjang serta adanya birokrasi menimbulkan keputusan para guru. Hal ini menimbulkan guru yang bertimbun-timbun di suatu daerah serta di luar daerah mengalami kekurangan guru (Poerbakwatja, 1970: 123-124).

Kondisi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengalihan fungsi SGB menjadi SMP. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 22 Juli tahun 1959 No. 69691/S tentang penghapusan SGB Negeri diseluruh Indonesia secara berangsur-angsur (*Arsip SMP Negeri VI Yogyakarta*, Surat Keputusan Menteri PP dan K Tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 No. 69691/S. Tentang melaksanakan penghapusan SGB di seluruh Indonesia secara berangsur-angsur terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960. Pada tahun 1961). SGB Purworejo melaksanakan pengalihan fungsi dari SGB menjadi SGA dan SMP. Pengalihfungsian ini tidak hanya gedung tetapi beserta isinya seperti guru SGB, dan semua peralatan belajar menjadi milik SGA serta SMP (Tumijo, wawancara di Desa Ngampel Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020).

C. Dampak Didirikannya Sekolah Guru B di Purworejo

1. Bidang Sosial Ekonomi

Sekolah Guru B (SGB) memiliki pengaruh besar terhadap bidang sosial yaitu posisi guru Sekolah Rakyat yang berasal dari lulusan SGB. Pada awal-awal kemerdekaan sangat terhormat dan prestisius. Sebutan “mas” atau “pak” guru pada masa ini adalah sebutan yang prestisius serta sekaligus sebutan yang memiliki makna penghormatan. Di daerah pedesaan guru termasuk dalam kategori priyayi yang wajib dihormati (Darmaningtyas, 2015: 114). Seorang priyayi tidak harus berasal dari keturunan bangsawan, tetapi juga mendapatkan gelar priyayi berdasarkan pendidikan yang diperoleh (Prasetya, 2009: 22). Berdasarkan hal tersebut perubahan status sosial yang juga dapat diperoleh melalui pendidikan dan

telah mengubah anak petani menjadi seorang priyayi. Sebagai pertanda adanya mobilitas melalui jalur pendidikan yang menghasilkan seorang guru (Prasetya, 2009:50). Murid lulusan SGB dengan ilmu pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki sebagai modal untuk mendapatkan pekerjaan. Lulusan SGB mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga pengajar Sekolah Rakyat (SR), dengan menjadi guru akan mendapatkan gaji yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup (Darmaningtyas, 2015:115). Lulusan SGB ini mendapatkan pekerjaan yang baik dan dengan demikian kesejahteraannya juga meningkat. Para lulusan SGB ini siap untuk bersaing dalam dunia kerja khususnya bidang pendidikan, karena telah mendapatkan pengetahuan di kelas satu, dua, tiga yang setara dengan SMP kemudian satu tahun di kelas empat merupakan pelajaran kependidikan. (Surya, 2004: 82). Praktik mengajar bagi murid SGB kelas empat ditempatkan ke SR Latihan yang ada di daerah Purworejo untuk latihan mengajar. (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020).

Para murid SGB saat masih bersekolah mendapatkan uang Tunjangan Ikatan Dinas, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi serta membantu perekonomian keluarga. Adanya hal tersebut para guru lulusan SGB menjadi sejahtera secara ekonomi (Tumijo, wawancara di Desa Ngampel Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020). Dampak ekonomi juga dirasakan lingkungan sekitar SGB, seperti masyarakat yang menyediakan tempat kos. Hal ini sangat menguntungkan para penyedia kos, karena pendapatannya meningkat (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari 2020). Hal ini mengakibatkan para penjual bahan pakaian dan penjahit mendapatkan pendapatan yang banyak. Ikatan Dinas senilai Rp.85,00 (*Arsip SMA Negeri 7 Purworejo, 1950-1961*) selain digunakan untuk membantu ekonomi keluarga juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi yaitu membeli bahan pakaian berupa baju maupun celana. Bahan pakaian tersebut kemudian diserahkan kepada para penjahit, hal ini mengakibatkan terjadi kelebihan jahitan sehingga pendapatannya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020).

2. Bidang Pendidikan

Pada masa kejayaannya terdapat 483 SGB di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut telah menghasilkan dan mendidik ratusan ribu guru Sekolah Rakyat. Guru-guru tersebut tersebar di seluruh pelosok tanah air mulai dari metropolitan sampai pedesaan di tepi gunung dan pantai (Surya, 2004: 81). Adanya sekolah SGB di Purworejo telah mengakibatkan terpenuhinya kebutuhan guru Sekolah Rakyat. Kemudian dengan banyaknya guru lulusan dari SGB menyebabkan kelebihan jumlah guru (*Majalah Djiwa Baru*, November 1959) yang disebabkan tidak tersedianya biaya untuk mengangkat dan menempatkan lulusan ke luar daerah. SGB telah berperan dalam rencana pelaksanaan program Kewajiban Belajar, karena dengan didirikannya sekolah guru tersebut telah membuat anak-anak desa yang tidak berkeinginan untuk masuk sekolah dengan adanya guru lulusan SGB ini membuat mereka bersekolah dengan mengikuti kegiatan belajar di tempat yang sudah tersedia SR.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah anak-anak yang memerlukan sekolah tidak diperhitungkan lagi sehingga sekolah guru yang telah mati dihidupkan kembali. Keadaan diperburuk dengannya guru mengambil kursus-kursus yang diadakannya untuk pindah mengajar ke sekolah menengah dengan gaji dan prestisenya lebih tinggi (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 130). Di Purworejo setelah SGB dihapuskan maka untuk menanggulangi kurangnya guru (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020) melalui KGB yang merupakan kesempatan para guru untuk mempertinggi ijazahnya dengan mengikuti pelajaran pada Kursus Lisan Persamaan SGB adanya surat keputusan menteri P.P.K Rg. 28 Agustus 1951 No. 4019/BIV telah diadakan Kursus Tertulis Persamaan SGB yang dilaksanakan dalam bentuk Rukun Belajar SGB (RBB) (*Majalah Pewarta P.P.K*, 13 Februari 1952). Keberadaan KGB yang berbentuk RBB disini merupakan hidupnya sekolah guru yang telah mati. Sekolah guru yang dihidupkan kembali ini tidak berangsur lama karena setelah dihapuskannya SGB lulusan SMP banyak yang memasuki SGA pendidikannya dianggap lebih baik untuk menjadi guru SR (*Majalah Suara Guru*, Oktober 1958).

KESIMPULAN

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang digunakan untuk Kewajiban Belajar karena memiliki ruang dan administratif yang cukup luas. Usaha melaksanakan Kewajiban Belajar ini mengalami kesulitan seperti biaya, gedung, murid, dan tenaga pengajar. Purworejo didirikan Sekolah guru B (SGB) untuk mengatasi kesulitan dalam tenaga pengajar. Penyelenggaraan Sekolah Guru B Purworejo (SGB) dalam tahun 1950-1961 terdapat tiga SGB terdiri dari SGB I Purworejo, SGB II Purworejo berasal dari KPKPKB Purworejo, dan SGB Kutoarjo dari KPKPKB Kemiri. Tunjangan Ikatan Dinas (ID) telah mendorong lulusan SR dan SMP untuk memasuki SGB. Pelajar SGB berasal dari daerah Purworejo maupun luar daerah. Pada tahun 1961 pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 22 Juli tahun 1959 No, 69691S tentang penghapusan SGB Negeri diseluruh Indonesia secara berangsur-angsur. SGB Purworejo melaksanakan penutupan dan pengalihan fungsi pada tahun 1961, semua yang menjadi milik SGB terdiri dari peralatan belajar, gedung, dan gurunya menjadi milik SGA dan SMP.

Dampak didirikannya SGB Purworejo terlihat secara sosial, guru SR lulusan SGB mengalami perubahan kenaikan status sosial dalam masyarakat karena yang berawal dari anak petani naik menjadi seorang priyayi guru setara dengan pegawai pemerintahan. Guru Sekolah Rakyat yang berasal dari lulusan SGB memiliki gaji yang cukup tinggi sehingga mampu mensejahterakan kehidupannya di masa mendatang. Pada masyarakat yang terdapat di lingkungan SGB sebagai penyedia kos-kosan serta para penjual bahan pakaian dan penjahit mendapatkan kenaikan penghasilan. Sekolah Guru B (SGB) Purworejo sudah memenuhi kebutuhan guru Sekolah Rakyat (SR), serta telah menimbulkan kelebihan jumlah guru. Hal ini diakibatkan dari ketersediaan gaji guru yang tidak ada. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan anak-anak siap untuk memasuki bangku sekolah menyebabkan kekurangan guru, sehingga SGB yang telah dihapuskan ini dimunculkan kembali tetapi dengan bentuk Kursus Guru B (KGB) yang dilaksanakan dengan Rukun Belajar SGB (RBB).

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip SMA Negeri 7 Purworejo berisi Daftar Induk Sekolah Guru Negeri A/B, 1950-1961.

Arsip SMP Negeri VI Yogyakarta berisi Surat Keputusan Menteri PP dan K Tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 No. 69691/S. Tentang melaksanakan penghapusan SGB di seluruh Indonesia secara berangsur-angsur terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960.

Majalah

Anonim, "Peraturan Umum Tentang Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Bagi Sekolah Lanjutan Dalam Lingkungan Kem. P.P Dan K", *Pewartar P.P.K*, No. 15, April 1952.

Anonim, "Peraturan Tentang Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar-Pelajar Sekolah Lanjutan Dan Khursus Yang Sederajat", *Pewartar P.P.K*, No. 22, November 1952.

Anonim, "Rukun Belajar SGA/SGB (disingkat R.B.A/R.B.B)", *Pewartar P.P.K*, No. 13, Februari 1952.

Dewantara, "Sistem Pendidikan Guru Secara Integral", *Pusara*, No. 6, September 1953.

Hardjosuwignjo S, "Kewajiban Belajar Adalah Kepentingan Nasional", *Djiwa Baru*, No. 11, November 1959.

Moh. Said, "Overproduksiguru", *Suara Guru*, No. 3, Oktober 1958.

Buku

Ahmadi A. 1987. *Pendidikan Dari Masa Ke Masa: Untuk Para Pendidik dan Calon Pendidik di Indonesia*. Bandung: CV Armico.

Darmaningtyas. 2015. *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Malang: Intrans Publishing.

Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Informasi Kabupaten Purworejo. Tanpa tahun. *Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Kajian Bangunan Bersejarah Kabupaten Purworejo Tahun 2007*. tidak diterbitkan.

Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K., 1960. *Triwarsa*. Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum.

Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana.

Hamzah. 2014. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Helius Sjamsuddin dkk. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Ing Wardiman Djojonegoro. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

Ketut Sedana Arta. 2015. *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.

Lapian AB dkk. 1996. *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1059*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Mohammad Surya. 2004. *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahman Hamid ABD dan Muhammad Saleh Madjid. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Soegarda Poerbakwatja. 1970. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Widi Astutik dkk., 1997. *Sistem Pendidikan Indonesia: Pada Masa Revolusi Politik Kemerdekaan (1945-1950)*. Surakarta: Pelangi Pres.

Jurnal

Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari. 2019. Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966), *Jurnal Agastya*, Vol. 9 (2).

Skripsi

Ayu Nenden Masden Badinah. 2017. "Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 1950-1961". *Skripsi*. Yogyakarta: UNY.

Destriana Astuti. 2016. "Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1961". *Skripsi*. Yogyakarta: UNY.

Eka Yuli Prasetya. 2009. "Kehidupan dan Pendidikan Belanda Kaum Priyayi Jawa Abad XX". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Wawancara

Kusnantoro, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 15

Juni 2020.

Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari 2020.

Seno, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 7 Maret 2020.

Slamet Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020.

Sobichan Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020.

Supijah, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri, Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020.

Tumijo, wawancara di Desa Ngampel, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020.